

EKSISTENSI ORGANISASI NEGARA DALAM ERA GLOBAL: PERSPEKTIF BUDAYA

Joko Sutarso

Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika
Universitas Muhammadiyah Surakarta

PENDAHULUAN

Dalam era reformasi ditandai oleh perubahan besar dalam tata kehidupan, baik ditinjau dari aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, termasuk perubahan dalam dunia pendidikan. Di Indonesia, perubahan besar dipengaruhi oleh dua hal, yaitu globalisasi dalam relasi internasional dan otonomi daerah yang telah diterapkan Indonesia dewasa ini. Globalisasi telah mendorong masyarakat menjadi semakin terbuka terhadap pengaruh dari luar wilayah suatu negara, sehingga daya saing antara satu negara terhadap negara lain menjadi hal yang begitu penting dalam hubungan ekonomi antar bangsa. Di tingkat nasional, tuntutan terhadap otonomi, mengemuka sejalan dengan meningkatnya wacana demokratisasi dalam kehidupan masyarakat. Keberhasilan otonomi ini pada akhirnya sangat tergantung pada kemampuan SDM dalam mengelola potensi alam dan manusia yang dimiliki oleh masyarakat di daerah untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat daerah itu. Pendidikan dapat mengambil peran yang besar dalam transformasi besar tersebut dengan merumuskan kembali visi pendidikannya.

Azyumardi Azra (2002: 224) mendefinisikan globalisasi sebagai arus orang-orang, barang-barang dan jasa, informasi dan gagasan melewati batas-batas negara-bangsa dan kebudayaan lokal, nasional dan regional. Menurut Giddens (2001) globalisasi merupakan fenomena yang hampir tidak bisa dihindari oleh suatu masyarakat modern sekarang, sekalipun tidak semua konsekuensinya menguntungkan dan baik. Bagi negara yang sedang berkembang yang kualitas SDM rendah sehingga

produktivitasnya dan daya saing rendah, globalisasi dapat menimbulkan kosekuensi yang kurang menguntungkan bagi perekonomiannya.

Pada awalnya, pengaruh globalisasi sangat terasa pada bidang ekonomi dan telah melahirkan tata ekonomi baru (*new economy*). Perkembangan *new economy* menuntut perubahan-perubahan baik di dalam organisasi maupun dalam tingkah laku para pelaku ekonomi. Dengan kata lain, era globalisasi disamping sangat dipengaruhi oleh penguasaan atas teknologi informasi dan komunikasi juga perlu didukung pemahaman terhadap berbagai latar budaya masyarakat antar bangsa (Nugroho dan Cahayani, 2003: 2). Oleh karena itu, wacana besar setelah wacana globalisasi adalah wacana demokratisasi, pluralisme dan multikulturalisme (Sirry, 2003).

Pengaruh wacana globalisasi, demokratisasi, pluralisme dan multikulturalisme terhadap pendidikan antara lain adalah perlunya diselenggarakan pendidikan yang lebih demokratis dan tidak diskriminatif. Pendidikan nilai dan watak (afeksi) tetap memiliki relevansi dalam sistem pendidikan nasional, terutama dalam rangka mengembangkan sikap toleran dan semakin meningkatnya pemahaman terhadap kehidupan budaya bangsa sendiri serta menggalang saling pengertian antar budaya dan antar bangsa dalam pergaulan internasional.

TANTANAN BARU DI ERA GLOBALISASI

Pengaruh globalisasi terhadap pendidikan dapat dipahami dengan melihat bagaimana kehidupan antar bangsa terjalin dan semakin terhubung (*interconnected*) satu sama lainnya. Bentuk nyata semakin terhubungnya satu bangsa dengan bangsa lain dapat dilihat dari semakin banyaknya perusahaan-perusahaan atau korporasi multinasional dari negara-negara maju melebarkan sayap di berbagai belahan dunia yang lain. Restoran makanan siap saji dan produk minuman bermerek internasional misalnya, sekarang dapat ditemui di berbagai kota-kota di Indonesia. Restoran dan produk minuman ini tidak hanya dimaksudkan untuk melayani tenaga kerja ekspatriat di Indonesia yang jumlahnya tidak terlalu besar, tetapi untuk melayani para pelanggan lokal yang semakin akrab dengan selera produk global ini.

Fenomena yang lain, dalam globalisasi juga ditandai dengan ekspansi perusahaan atau korporasi multinasional dengan menginvestasikan modalnya di negara berkembang, dengan alasan untuk efisiensi dan mendekati pasar. Efisiensi ekonomis dapat dicapai karena di negara berkembang umumnya, tenaga kerja dan beberapa faktor produksi lainnya relatif cukup murah, sedangkan dari sisi pemasaran produk dapat dihemat beberapa biaya, seperti biaya transportasi, karena produk dibuat semakin dekat dengan pasar atau konsumennya. Kemudian permasalahan yang muncul sebagai akibat dari semakin banyaknya perusahaan asing di negara berkembang yang melibatkan tenaga kerja lokal adalah adanya kendala bahasa atau komunikasi dan kesenjangan budaya. Kendala bahasa dapat di atasi dengan waktu yang relatif cepat dengan memberikan kursus atau pendidikan ketrampilan berbahasa kepada para staf dan karyawan lokal di suatu perusahaan multinasional, apalagi sekarang banyak lembaga pendidikan yang mengharuskan peserta didik untuk menguasai bahasa, terutama bahasa Inggris dengan standar tertentu sebagai syarat kelulusan. Sementara itu kesenjangan budaya tidak bisa diselesaikan secara cepat sebagaimana mengatasi kendala bahasa.

Permasalahannya kemudian adalah bagaimana pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan dan ketrampilan bekerja namun juga mampu mengatasi dan mengantisipasi kesenjangan budaya dalam rangka menyiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan beradaptasi dengan berbagai kultur yang terdapat dalam dunia kerja. Toleransi dan pemahaman terhadap kultur berbagai bangsa akan berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja bersama dengan orang-orang dengan berbagai ragam latar kultural yang berbeda-beda.

Sebagaimana dikemukakan dalam pendahuluan bahwa globalisasi merupakan fenomena yang sangat terasa terutama dalam bidang ekonomi yang salah satu aspek pentingnya adalah masalah SDM. Menurut Kusumohamidjojo (2000: 142) globalisasi telah mendekatkan manusia dengan manusia, masyarakat dengan masyarakat, kebudayaan dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Tetapi globalisasi

juga bisa mempertinggi tingkat pertentangan antar manusia, antar masyarakat, dan antar kebudayaan. Dengan demikian pendekatan budaya dalam pendidikan diharapkan dapat meningkatkan pengertian dan pemahaman berbagai latar budaya yang beraneka ragam, disamping tentunya berusaha meningkatkan mutu SDM dan daya saingnya.

Pengaruh globalisasi terhadap eksistensi negara-bangsa dikemukakan oleh Kenichi Ohmae (2002) yang mengemukakan bahwa ada kecenderungan munculnya negara kawasan (regionalisasi). Munculnya negara kawasan ini sangat kelihatan terutama dalam bidang kerjasama ekonomi, seperti munculnya Uni Eropa dengan mata uang Euro, kerjasama ekonomi di tingkat regional APEC, AFTA, dsb. Hal senada dikemukakan Daniel Bell dalam Buchori (2001: 27) yang mengemukakan bahwa ada dua kecenderungan yang bertolak belakang di masa depan, yaitu kecenderungan untuk berintegrasi dalam bidang ekonomi, dan kecenderungan untuk berpecah belah (fragmentasi) dalam kehidupan politik. Dalam beberapa hal, prediksi fragmentasi kehidupan politik ini bahkan telah terjadi di negara-negara Eropa Timur dan Balkan.

Gejala globalisasi sudah lama dirasakan oleh negara-negara berkembang dalam bentuk symbol-simbol modernisasi sebagaimana disebut oleh Alvin Toffler (1992) sebagai 3 F, yaitu *Food*, *Fun* dan *Fashion*. *Food* maksudnya makanan sebagaimana tersaji dalam berbagai produk makanan *fast food* seperti Kentucky Fried Chicken (KFC), Mc Donald, Pizza, dsb. Disamping produk makanan, masyarakat negara berkembang juga semakin akrab dengan minuman Coca Cola, Pepsi, Sprite, dan produk-produk lainnya. Pengaruh dunia *fun* bisa dilihat dari begitu besarnya pengaruh hiburan baik berupa film baik layar lebar maupun televisi, musik dan dunia gemerlap lainnya. Dunia hiburan ini erat hubungannya dengan *fashion*, karena melalui dunia hiburan diperkenalkan model baju, asesoris, rambut dan dandanan lainnya. Pengaruh ini ternyata tidak hanya terjadi pada kaum remaja saja. Tentu masih ingat ketika muncul “demam” potongan rambut Demi Moore setelah sukses sang bintang dalam film *Ghost*.

Sedangkan Kenichi Ohmae (2002) menyebutkan besarnya pengaruh “4I” yang akan sangat berpengaruh di era global. Empat I tersebut meliputi: *Pertama*, Investasi. Pasar modal dunia telah kelebihan investasi untuk memenuhi keperluan negara-negara maju, dan masalahnya kesempatan investasi yang menjanjikan keuntungan besar tidak selalu sama dengan darimana dana itu berasal. Investasi tidak lagi dibatasi oleh batas geografis ataupun bangsa, bahkan kehadirannya dinantikan di berbagai negara berkembang di Asia pada umumnya dan sebagaimana investasi asing pada umumnya, investasi asing ini bisa pergi manakala iklim investasi di negara berkembang tersebut dianggap tidak lagi menguntungkan. Kasus penutupan pabrik elektronik Sony di Indonesia dapat menjelaskan fenomena ini. *Kedua*, Industri. Industri tidak lagi harus melakukan negoisasi dengan kepentingan pemerintah. Di masa lalu pemerintah sebagai representasi negara dapat melakukan regulasi pajak, bea masuk atau substitusi ekspor sebagai strategi melindungi (proteksi) industri dalam negeri. Di masa sekarang bentuk proteksi dan berbagai bentuk *entry barrier* dilarang dan negara yang merasa dirugikan oleh perdagangan yang tidak adil dapat mengajukannya ke sidang GATT atau WTO. Dunia industri asing yang berada pada suatu negara pada umumnya bertujuan untuk mendekati pasar potensial sekaligus mengurangi ongkos produksi seperti misalnya murahnya tenaga kerja, tersedianya sumber daya alam dan untuk mengurangi ongkos transportasi. *Ketiga*, teknologi informasi. Dengan kemajuan perkembangan teknologi internet maka dapat dipahami bagaimana jaringan perusahaan multinasional mengembangkan jaringan teknologi informasi yang memungkinkan untuk mengendalikan berbagai anak perusahaannya di berbagai belahan dunia. Hal ini tentu semakin mengukuhkan bagaimana *new economy* dunia terbentuk. *Keempat*, konsumen individual. Para konsumen tidak lagi dikondisikan oleh larangan-larangan oleh pemerintah. Para konsumen dapat melakukan pemilihan terhadap produk yang akan mereka konsumsi, misalnya karena harganya lebih murah, sesuai selera dan kualitas lebih baik tanpa memperdulikan darimana barang itu berasal. Kompetisi antar bangsa menjadi semakin ketat.

Kompetisi itu bisa berupa harga, mutu maupun jumlah tanpa memperhatikan darimana barang itu berasal. Dengan demikian batas-batas bangsa semakin kabur.

Dalam kaitannya dengan aspek internasionalisasi dalam aspek ekonomi dalam era global ini, Jeff S. Luke (1999: 16) menyatakan dua hal. *Pertama*, integrasi global dari pasar modal sebagai salah satu bentuk dari produk revolusi komunikasi sehingga memudahkan kapital berpindah dari negara-negara maju, dengan cepat berpindah ke ekonomi dunia. *Kedua*, pembangunan industri yang mendunia telah diperkuat dengan persebaran pertumbuhan cepat sebagai akibat kemajuan teknologi.

Globalisasi di mana masyarakat saling terhubung dan batas-batas kultural antar bangsa semakin terbuka, maka keunggulan dan daya saing suatu bangsa atas bangsa lain menjadi faktor yang penting. Di sisi lain, perlu dikembangkan pemahaman baru dan mendukung terciptanya kultur yang semakin toleran terhadap keragaman kebudayaan bangsa-bangsa yang lain sehingga dapat terjalin kerja sama yang adil dalam hubungan antar masyarakat dan bangsa. Keunggulan suatu masyarakat atau bangsa terhadap masyarakat atau bangsa yang lain tidak seharusnya tidak menimbulkan diskriminasi, eksploitasi dan ketergantungan terhadap negara maju atas negara berkembang. Sementara itu negara berkembang dapat menumbuhkan sikap toleran yang didasarkan nilai-nilai persamaan (*equality*) dan keadilan (*equity*). Pendidikan dapat mengembangkan nilai-nilai multikulturalisme dalam rangka mempersiapkan peserta didik menghadapi globalisasi. Pendidikan dapat mempersiapkan jenis-jenis ilmu pengetahuan dan ketrampilan tertentu yang diperkirakan semakin dibutuhkan di masa depan sekaligus dapat menciptakan kondisi kultural yang semakin kondusif terhadap keragaman, baik keragaman di tingkat lokal, nasional dan internasional. Dengan demikian persiapan SDM melalui pendidikan seharusnya dapat menjawab tantangan lokal, nasional dan global.

Dewasa ini multikulturalisme ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan tentang globalisasi. Inti dari multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, ataupun agama (Sirry, 2003).

Multikulturalisme dalam pendidikan dapat diintegrasikan dalam pendidikan nilai dan watak (karakter) dan pada umumnya pendidikan nilai dan watak efektif bila diberikan sejak usia dini.

MEROSOTNYA EKSISTENSI ORGANISASI NEGARA DALAM ERA GLOBAL

Ada dua pendapat dalam menjawab pertanyaan bagaimana eksistensi organisasi negara dalam era global dan masing-masing pendapat tersebut mempunyai argumentasi yang sama-sama kuat. Pendapat pertama menyatakan bahwa globalisasi tidak mengurangi eksistensi organisasi negara dan, pendapat kedua menyatakan bahwa eksistensi organisasi negara menjadi berkurang di era global.

Gus Dur Presiden Indonesia keempat dalam menjalankan pemerintahan percaya terhadap pendapat bahwa *good government is less government* atau pemerintah yang baik adalah pemerintah yang sedikit mungkin mengatur masyarakat (memerintah). Pendapat ini bukan sama sekali baru. Banyak pemikiran tentang peran pemerintah menyatakan hal yang sama. Hal ini menimbulkan perdebatan lama tentang seberapa besar seharusnya peran pemerintah dalam mengatur masyarakat dan seberapa besar hak yang tetap dimiliki masyarakat dan tidak dapat diintervensi oleh pemerintah (negara).

Negara dinyatakan kuat apabila masyarakat lemah, dan sebaiknya negara lemah apabila masyarakat terlalu kuat. Bila pendapat ini benar maka negara yang kuat akan melakukan berbagai regulasi untuk mencapai tujuan-tujuan negara. Tujuan itu misalnya berkaitan dengan tujuan pembangunan ekonomi, industri, moneter, pendidikan, perdagangan, pertahanan keamanan, politik, sosial dan budaya. Regulasi negara terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat ini akan mengurangi kebebasan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan tersebut. Akibatnya masyarakat merasa terkekang dan kehidupan politik menjadi tidak demokratis.

Sebaliknya apabila negara lemah dan individu-individu dalam masyarakat menjadi kuat maka inisiatif masyarakat menjadi begitu berpengaruh terhadap keputusan dan pemenuhan kebutuhan bersama. Di Indonesia, otonomi daerah adalah sebagai salah satu bentuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat lokal dan masyarakat pada umumnya. Sekalipun dampak negatifnya sudah tampak misalnya pindahnya KKN dari pusat ke daerah, munculnya “raja-raja” kecil di daerah, naiknya jumlah dan jenis pajak daerah sehingga beban masyarakat menjadi semakin berat. Hal ini tentu tidak sejalan dengan tujuan dari otonomi daerah itu sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya alam dan manusia untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Bahkan muncul bahaya yang lain, misalnya adanya peraturan bahwa pemerintah kabupaten dan kota dapat melakukan pinjaman luar negeri. Hal ini berbahaya bila tidak didukung oleh manajemen yang baik, transparan dan audit keuangan yang ketat.

Di tingkat global negara yang kuat akan mengakibatkan sulitnya intervensi negara asing terhadap negara tersebut karena setiap bantuan serta negara atau lembaga asing tidak dapat langsung diberikan kepada masyarakat. Perlu kiranya dipahami bahwa bantuan asing hampir selalu disertai misi untuk melindungi dan membentuk citra (*image*) yang baik terhadap lembaga dan kepentingan negara tersebut di negara yang diberi bantuan. Dengan kata lain, bantuan yang diberikan oleh negara donor tidaklah grati, ada pamrih. Bahkan ada kecenderungan berbagai hutang/bantuan luar negeri menjadi perangkat ketergantungan negara perifer terhadap negara center, negara marginal terhadap negara dominan, negara miskin terhadap negara kaya (Rachbini, 1995).

Demikian juga globalisasi tidak lepas dari desain negara maju dalam rangka memenuhi kepentingan ekonomi dan industrinya. Isu demokrasi, hak asasi manusia (HAM), gender, pluralisme dan multikulturalisme harus dipandang sebagai bagian dari desain hegemoni negara maju terhadap negara berkembang. Karena Amerika Serikat sebagai kampiun demokrasi, belakangan ini tidak dapat lagi menjadi contoh bagi demokrasi dan menggunakan standar ganda dalam isu penegakan HAM.

Demikian juga dalam isu globalisasi, di satu sisi merupakan hal yang tidak bisa dihindari namun di sisi lain tidak semua konsekuensinya baik. Isu demokrasi, pluralisme dan multikulturalisme pun pantas diberi catatan karena isu tersebut tidak dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip *equity* (keadilan) dan *equality* (persamaan) sehingga isu tersebut menjadi kehilangan makna.

Sebagaimana dikemukakan di muka, sekalipun tidak semua konsekuensi globalisasi baik bahkan banyak masyarakat negara menolak, termasuk masyarakat Eropa sendiri namun bagi bangsa Indonesia globalisasi merupakan hal yang suka tidak suka, mau tidak mau harus diterima kehadirannya. Namun perlunya kiranya dikembangkan strategi kebudayaan untuk meminimalisir dampak globalisasi yang merugikan. Strategi kebudayaan ini dikembangkan berdasarkan komitmen masyarakat bangsa untuk mendahulukan kepentingan nasional dalam mengadakan interaksi ataupun kerjasama dengan negara bangsa lain.

PENUTUP

Globalisasi dapat mereduksi eksistensi organisasi negara dari organisasi negara yang kuat menjadi organisasi negara yang lemah. Namun eksistensi masyarakat yang semakin kuat di era otonomi ini bila tidak dibarengi dengan kemajuan yang berarti dalam etika dan perilaku masyarakat tentu akan menjadi hambatan. Masyarakat yang diharapkan semakin mendukung otonomi daerah yang disemangati oleh prinsip demokratisasi dan penguatan partisipasi masyarakat daerah dalam mengelola kekayaan dan sumber daya daerah untuk kesejahteraan masyarakat daerah, dapat terpinggirkan kembali. Jejaring globalisasi juga telah merambah ke daerah antara lain dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang memberikan peluang bagi daerah untuk mengadakan kerjasama luar negeri dan pinjaman luar negeri. Dengan demikian semakin diperlukan pemerintahan daerah yang kuat baik secara legitimasi (politik) maupun manajemen (akuntabilitas). Di sisi lain, pengawasan masyarakat, baik yang dilakukan sendiri maupun melalui LSM, terhadap kinerja pemerintah daerah dan isi kebijakan publik lainnya, terutama produk pemerintah daerah yang dewasa ini

memiliki kekuasaan yang demikian luas, semakin diperlukan. Apabila fungsi kontrol masyarakat dapat efektif dan efisien maka eksistensi negara, terutama berkaitan dengan kedaulatan dapat dipertahankan atau semakin bahkan meningkat karena masyarakat memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam bidang pemerintahan dan terutama pengawasan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. 2002. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Kompas.
- Buchori, Mochtar. 2001. *Pendidikan Antisipatoris*. Yogyakarta: Kanisius.
- Giddens, Anthony, 2001. *Runaway World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*. Jakarta: Grasindo.
- Hikam, Mohammad AS. 1999. *Politik Kewarganegaraan: Landasan Redemokratisasi di Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2000. *Kebhinekaan Masyarakat di Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*. Jakarta: Grasindo.
- Luke, Jeff S. 1999. "Managing Interconnectedness: The New Challenge for Public Administration" dalam Bailey, Mary Timmney and Mayer, Richard T. (ed). 1999. *Public Management in an Interconnected World*. New York: Greenwood Press.
- Nugroho, Alois A dan Cahayani, Ati. 2003. *Multikulturalisme dalam Bisnis*. Jakarta: Grasindo.
- Ohmae, Kenichi. 2002. *Hancurnya Negara-bangsa: Bangkitnya Negara Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional di Dunia Tak Terbatas*. Yogyakarta: Qalam.
- Rachbini, Didik J. 1995. *Risiko Pembangunan yang Dibimbing Utang*. Jakarta: Grasindo.
- Snow, Nancy. 2003. *Propaganda Inc.: Menjual Budaya Amerika ke Dunia*. Jakarta: Penerbit Opini.

Sirry, Mun'im. 2003. "Agama, Demokrasi dan Multikulturalisme" dalam Harian **Kompas**, 1 Mei 2003.

RIWAYAT PENULIS

Joko Sutarso. Lahir di Karanganyar tanggal 1 Juni 1964. Tercatat sebagai dosen FKIP/PPKn UMS sejak tahun 1993. Menamatkan Sarjana Pendidikan di IKIP Yogyakarta tahun 1990 dan Sarjana Ekonomi di Fakultas ekonomi UMS tahun 2000. Pada tahun 2005 menamatkan Pendidikan Pasca Sarjana Manajemen Komunikasi pada Program Studi Manajemen Komunikasi. Sekarang mendapat amanah sebagai Sekretaris Fakultas Komunikasi dan Informatika sejak berdiri tahun 2006.